

HAKEKAT KURIKULUM PENDIDIKAN DAN SEJARAH PERKEMBANGANNYA DI INDONESIA

Imam Syafi'i

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yayasan Pendidikan Bhakti Wanita Islam (YPBWI) Surabaya.

Abstract

Kurikulum mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam lembaga pendidikan. Karena, salah satu penentu keberhasilan pendidikan terdapat pada kurikulum. Kurikulum diharapkan dapat menjadi sarana terciptanya tujuan pendidikan nasional, sebagaimana pasal 3 dan penjelasan atas UUR I No. 20 tahun 2003). Namun, pada realitasnya kurikulum dijadikan media politis dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu negara. Lebih dari itu, masyarakat menjadikan dua kekuatan yang saling tarik ulur, apakah kurikulum menyesuaikan masyarakat, ataukah masyarakat yang harus mengikuti perkembangan kurikulum. Untuk itu, ada tiga peranan kurikulum yang dinilai sangat penting dalam menjawab problematika ini yakni, peranan konservatif, kreatif, dan kritis. Ketiga peranan ini harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum menjadi tidak optimal. Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan. Sehingga, pihak-pihak yang terkait idealnya dapat memahami betul apa yang menjadi tujuan dan isi dari kurikulum yang diterapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Keywords: Hakekat, Kurikulum, Perkembangan

Pendahuluan

Banyak faktor dan unsur yang perlu dibahas dalam hubungannya dengan kurikulum. Karena secara ideal kurikulum diasumsikan sebagai media dalam

mencapai tujuan. Tujuan yang telah diformulasikan konsekuensinya dalam kurikulum selalu menjadi bagian atau sub-ordinat dari tujuan yang telah diinginkan. Di samping itu kurikulum pada realitasnya dijadikan media politik dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu negara. Lebih ironis lagi kurikulum dan masyarakat menjadi dua kekuatan yang saling tarik ulur, apakah kurikulum menyesuaikan masyarakat ataukah masyarakat yang harus mengikuti perkembangan kurikulum begitu saja.

Dua hal di atas tentunya mempunyai implikasi sendiri-sendiri. Jika kurikulum yang harus menyesuaikan dengan masyarakat, maka implikasinya adalah tidak ada konsistensi kurikulum dalam waktu tertentu. Sehingga tujuan-tujuan yang harus di formulasikan kemungkinan sulit dicapai. Sebaliknya jika masyarakat yang harus mengikuti dinamika kurikulum, maka konsekuensinya masyarakat tidak mempunyai andil dalam menentukan kurikulum. Padahal pada akhirnya output yang dihasilkan akan kembali ke masyarakat.

Konsekuensi di atas tentunya juga berimplikasi pada form curriculum scope dan sequence pada berbagai jenis kurikulum. Kurikulum sendiri mencoba mewujudkan teori konsep, pandangan tentang perkembangan anak dan kebutuhan masyarakat. Bila tujuan utamanya transmisi atau transfer kultural dan pengetahuan, maka organisasi kurikulum yang sesuai adalah berupa mata pelajaran yang lazim disebut subject matter curriculum. Akan tetapi bila kebutuhan masyarakat atau anak menjadi tujuan utama, maka yang paling serasi adalah kurikulum yang berdasarkan masalah-masalah masyarakat atau anak yang biasanya bersifat integrated atau terpadu.

Dalam organisasi kurikulum terdapat tiga tahapan yakni, subject matter curriculum (kurikulum berdasarkan mata pelajaran), correlated curriculum (korelasi kurikulum), dan integrated curriculum (kurikulum gabungan). Subject matter curriculum, pengajaran bidang studi secara terpisah dengan pembahasan bahan serta waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Correlated curriculum, bidang studi yang beraneka ragam, tetapi sejenis yang dikelompokkan untuk membahas sesuatu yang relevan. Integrated curriculum, merupakan pembahasan suatu topik atau permasalahan yang dibahas dengan berbagai pokok permasalahan, baik dari bidang studi yang sejenis maupun dari bidang studi yang relevan.¹

¹ Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 33.

Dari subject matter curriculum di atas, biasa juga dikatakan sebagai separate-subject curriculum di mana bidang studi diberikan secara terpisah-pisah, yang satu lepas dari yang lain. Meskipun kedua mata pelajaran tersebut sangat dekat hubungannya. Dalam hal ini terdapat beberapa kelemahan di antaranya adalah bahan pelajaran dapat diberikan secara logis dan sistematis, organisasi kurikulum ini sederhana, mudah direncanakan, dan dilaksanakan. Di samping itu, kurikulum ini mudah pula dinilai dan diterapkan di pendidikan tingkat tinggi, serta diterapkan secara berabad-abad lamanya dan sudah menjadi tradisi. Kurikulum ini lebih memudahkan bagi guru dan mudah untuk diubah. Organisasi kurikulum yang sistematis sebagaimana yang dimiliki oleh subject-curriculum sensual untuk menginterpretasikan pengalaman.²

Subject matter curriculum ini menekankan pada mata pelajaran secara terpisah-pisah, misalnya: Bahasa Daerah, Pendidikan Agama Islam, Bahasa Inggris, dan di antara mata pelajaran ini tidak berhubungan di antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan Carrelated Curricukulum adalah pola mengelompokkan mata pelajaran yang dianggap terdapat kedekatan untuk untuk berhubungan. Korelasi ini antara dua bidang studi diadakan hubungan secara insidental.³ Misalnya geografi dapat disinggung dengan sejarah. Hubungan yang lebih erat bisa karena suatu pokok bahasan disajikan dengan beberapa materi pelajaran. Contoh, sawah dibahas dalam pelajaran geografi, ilmu tumbuh-tumbuhan, menggambar, bernyanyi. Setiap mata pelajaran diberikan jam tertentu, tetapi masih tetap dalam koridor masalah yang serupa. Selain itu dapat pula beberapa bidang studi yang disatukan, misalnya geografi, ekonomi, sejarah dan akutansi digabungkan menjadi ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan kimia, fisika, biologi digabungkan menjadi ilmu pengetahuan alam (IPA).

Sedangkan integrated curriculum adalah proses penggabungan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain, misalnya mata pelajaran IPA tentang alam semesta diintegrasikan dengan pendidikan Agama Islam.⁴ Integrasi kurikulum meniadakan

² Nasution, *Asas-Asas Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 181-185. Organisasi kurikulum ini mempunyai beberapa kekurangan di antaranya bahwa kurikulum ini memberikan mata pelajaran yang lepas-lepas yang tidak berhubungan satu dengan yang lain, dan kurikulum ini tidak memperhatikan masalah-masalah social yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum ini menyampaikan pengalaman umat manusia yang lampau dalam bentuk sistematis dan logis, dan semua yang logis tidak selalu psikologis jika ditinjau dari segi minat dan perkembangan anak, tujuan kurikulum ini terlampaui terbatas serta kurang mengembangkan kemampuan berfikir, kurikulum ini cenderung menjadi statis dan ketinggalan zaman.

³ Ibid., 192.

⁴ Subandjah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 59.

batas-batas antara berbagai bidang studi dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit⁵ atau keseluruhan. Dengan kebulatan bahan pelajaran, diharapkan kita dapat membentuk anak-anak menjadi pribadi yang integrated, yakni manusia yang sesuai atau selaras hidupnya dengan sekitar.

Secara historis di Indonesia pada masa orde lama kebijakan kurikulum lebih di arahkan pada indrokrinasi dan menolak segala unsur kultural yang berasal dari luar. Dengan sendirinya pendidikan tidak di fungsikan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat dan kebutuhan pasar, tetapi lebih diorientasikan pada kebutuhan politik.

Pada masa Orde Baru pendidikan diarahkan kepada uniformitas dalam berfikir dan bertindak. Sehingga kemungkinan terbentuknya masyarakat yang homogen. Stabilitas politik dan keamanan merupakan pilar utama untuk mencapai perkembangan ekonomi yang tinggi. Secara politis tentunya sangat mengagumkan, tapi di balik itu juga memunculkan implikasi yang negatif yaitu berkembangnya kelas menengah yang lamban dan lemah serta mematikan kehidupan demokratis.

Sebagai contoh diterapkannya di Indonesia adalah kurikulum gabungan dimana kurikulum ini menerapkan sistem broad field, sehingga kurikulum di Indonesia mengenal adanya IPA yang merupakan gabungan antara Fisika, Kimia dan Biologi. Dikenal juga IPS atau social studies sebagai gabungan antara pelajaran sejarah, ekonomi, geografi, antropologi dan psikologi. Serta jurusan bahasa yang merupakan gabungan antara tata bahasa, membaca, mengarang dan bercakap-cakap.

Penerapan kurikulum seperti ini, memiliki kelemahan yaitu terpisah-pisahannya berbagai disiplin ilmu. Kurikulum ini merupakan modifikasi subyek yang terpisah-pisah. Agar pengetahuan anak tidak lepas-lepas, maka diusahakan hubungan antara dua mata pelajaran atau lebih yang dapat dipandang sebagai kelompok yang pada hakekatnya mempunyai hubungan yang erat.

Penggabungan ini bukan sekedar tindakan administratif yang mengharuskan sejumlah pelajaran yang bersangkutan secara berurutan pada jam-jam tertentu. Jika demikian halnya, maka gabungan itu semu belaka dengan

⁵ Nasution, *Asas-Asas Kurikulum...*, 198-200. Di antara cirri-ciri integrasi kurikulum adalah unit yang merupakan suatu keseluruhan yang mulat misalnya, siswa membahas suatu masalah, seorang guru bertindak sebagai fasilitator menjaga agar yang dibahas tidak keluar dari pokok permasalahan. Kemudian unit menerobos batas-batas mata pelajaran. Unit juga didasarkan pada pendapat-pendapat modern mengenai cara belajar.

kemungkinan bahwa guru sejarah yang mengajarkan IPS akan mengutamakan mata pelajarannya dan menjadikan mata pelajaran lain sebagai pembantu belaka. Agar tercapai gabungan yang nyata maka perlu integrating trends atau focusing center berupa tujuan, prinsip-prinsip umum, teori atau masalah masyarakat dan kehidupan yang dapat mewujudkan gabungan itu secara wajar. Terbentuknya kurikulum gabungan ini di dorong oleh usaha mengadakan integrasi dalam pengetahuan anak dan mencegah penguasaan bahan yang banyak, akan tetapi memandang dan lepas-lepas sehingga mudah di lupakan dan tidak fungsional.

Kurikulum gabungan ini di terima sebagai organisasi kurikulum yang mula-mula dimasukkan dalam kurikulum 1975. Dalam pelaksanaannya masih banyak kesulitan dan hambatan. Prinsip gabungan ini masih belum dipahami para pelaksana pendidikan, terutama guru-guru yang masih cenderung berpegang kepada pengajaran dengan latar pendidikannya di lembaga pendidikan guru.

Beberapa hal di atas merupakan sebagian kecil dari berbagai macam problem pendidikan di Indonesia yang harus mendapatkan perhatian serius bagi pemerhati dan pelaku pendidikan. Namun tulisan ini hanya akan membatasi pembahasan pada faktor-faktor kurikulum. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memfokuskan permasalahan sehingga dapat menemukan arah pembicaraan yang tepat.

Pengertian dan Hakekat Kurikulum

Menurut bahasa kata kurikulum⁶ berasal dari bahasa Yunani *currere* yang berarti jarak tempuh lari mulai dari start sampai finish. Kemudian pada tahun 1955 kurikulum dipahami dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata kuliah di suatu perguruan.⁷ Sedangkan dalam istilah dunia pendidikan

⁶S. Nasution, *Azas-Azas Kurikulum* (Bandung: Jenmars, 1980), 5. Istilah kurikulum awalnya digunakan dalam dunia olah raga yang berupa tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh seorang pelari dalam perlombaan lari *estafet* dalam dunia atletik. Lihat pula S. Nasution, *Azas-Azas Kurikulum* (Bandung: Bumi Aksara, 2006), 2. di Indonesia istilah kurikulum boleh dikatakan baru menjadi populer sejak tahun lima puluhan, yang dipopulerkan oleh mereka yang memperoleh pendidikan di Amerika Serikat. Kini istilah itu telah dikenal orang di luar pendidikan. Sebelumnya yang lazim digunakan adalah "rencana pelajaran" pada hakikatnya kurikulum sama sama artinya dengan rencana pelajaran. Sedangkan menurut Choirul, secara bahasa kurikulum berasal dari bahasa latin, *currere* yang berarti lapangan tempat lomba lari. Kurikulum juga bisa berarti *curriculum* yang mengandung arti jarak yang ditempuh oleh seorang pelari. Choirul Anam, *Pengembangan Kurikulum Agama Islam* (Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2009), 1. Oleh karena itu perubahan kurikulum merupakan pengembangan kurikulum yang telah berjalan dengan mengadopsi bagian-bagian potensial kurikulum tersebut dengan tujuan mendapatkan sintesa kurikulum baru yang lebih baik.

⁷ Subandiyah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum* (Jakarta: Gravindo Persada, 1993), 1.

kontemporer, secara umum arti kurikulum dapat didefinisi sebagai kumpulan mata pelajaran atau pengetahuan yang harus dipelajari oleh para mahasiswa.⁸ Kurikulum merupakan alat yang sangat penting dalam keberhasilan suatu pendidikan, tanpa adanya kurikulum yang baik dan tepat maka akan sulit dalam mencapai tujuan dan sasaran tujuan yang dicita-citakan.⁹

Sementara Arthur K. Ellis mengemukakan bahwa kurikulum dipengaruhi oleh filosofis atau aliran filsafat pendidikan tertentu. Dalam filsafat pendidikan terdapat berbagai aliran yang dapat dipetakan ke dalam dua kelompok, yaitu: tradisional dan kontemporer. Tradisional yang dimaksud yakni kelompok Perennialism dan Essentialism. Sedangkan kelompok kontemporer adalah Progressivism, Recontructionism dan Exsistensialism.¹⁰ Kemudian pengaruh pandangan filosofis terhadap kurikulum ini ditandai oleh pengertian kurikulum yang dinyatakan sebagai subject matter, content, atau bahkan transfer of cultural. Dengan demikian para ahli yang menganut aliran perennialism menyatakan bahwa kurikulum merupakan transfer of culture.¹¹

Oleh karena itu, kurikulum sebagai rencana pembelajaran, merupakan program pendidikan yang disediakan untuk memberikan pemahaman kepada para mahasiswa. Dengan program itu para mahasiswa melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mampu menunjukkan perubahan dan perkembangan tingkah laku mereka, sesuai dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, lembaga perguruan tinggi selayaknya menyediakan lingkungan bagi mahasiswa yang memberikan kesempatan belajar. Oleh karena itu, kurikulum harus disusun sedemikian rupa agar maksud dan tujuan tersebut dapat tercapai. Di samping itu kurikulum tidak terbatas pada sejumlah mata kuliah saja, akan tetapi meliputi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan mahasiswa, seperti: bangunan gedung, media pembelajaran, perpustakaan, dan lokasi yang memadai yang pada gilirannya menyediakan kemungkinan belajar secara efektif dan kondusif. Semua kesempatan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh para

⁸ Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 19. Di samping itu kurikulum juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

⁹ Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 3.

¹⁰ Artur K. Ellis, Cogan, J. John, Howey, Kenneth R, *Intraduction To The Foundations of Education* (New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1986), 115.

¹¹ Daniel Tanner, dan Laurel Tanner, *Curriculum Development: Theory into Practice* (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1980), 104.

mahasiswa direncanakan dalam suatu kurikulum. Dengan demikian dapat diambil benang merah bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan mata kuliah serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan.

Sebelum membahas tentang problematika pendidikan nasional yang berkaitan dengan kurikulum, alangkah lebih baiknya dipaparkan makna kurikulum itu sendiri. Hal ini penting ditekankan karena wacana tentang kurikulum, tampak yang merujuk pada "barang" yang berlainan, sehingga pembicaraan mengenai kurikulum akan menjadi simpang siur. Oleh karena itu untuk memperluas wacana, maka berdasarkan dampaknya pada peserta didik terdapat lima makna kurikulum yang berbeda-beda, yakni:

Pertama, kurikulum ideal mengandung segala sesuatu yang dianggap penting sehingga dianggap perlu dimasukkan ke dalam kurikulum oleh hampir setiap orang. Cakupannya jelas dan sangat luas, kandungan isinya sangat tidak sistematis, dan bebannya sangat besar, sehingga tidak mungkin diwujudkan fungsi kurikulum ini sebagai pencerminan aspirasi konstituen yang perlu di perhatikan, disaring, ditata serta dikemas dalam sosok yang tepat oleh semua pihak yang terlihat dalam urusan pendidikan formal, mulai dari pengembang kurikulum dan pengelola pendidikan sampai dengan guru sebagai fasilitator pembelajaran yang merupakan ujung tombak pelaksana di lapangan.

Kedua, kurikulum formal yaitu, kurikulum yang akhirnya di-sanetion (disetujui) oleh yang berkewenangan dan kemudian ditampilkan sebagai dokumen resmi kurikulum. Di Indonesia, kurikulum formal ini terdiri dari tujuan, materi yang merupakan bagian terbesar serta pedoman umum pelaksanaan.

Ketiga, kurikulum instruksional merupakan terjemahan dari kurikulum formal menjadi seperangkat skenario pembelajaran dari jam pertemuan ke jam pertemuan oleh guru yang bertugas mengimplementasikan suatu kurikulum formal dalam konteks kelembagaan tertentu¹².

Keempat, kurikulum operasional ialah perwujudan obyektif dari niat kurikulum instruksional dalam bentuk interaksi pembelajaran apa yang telah dilakukan oleh guru, apa yang dikerjakan oleh peserta didik, dan bagaimana interaksi antara keduanya. Tidak dapat di elakkan bahwa konsep kurikulum ini

¹²Daniel Tanner dan Laurel Tanner, *Curriculum Development Theory into Practice Debra A. Stollenwerk (ed)* (Englewood Cliffs, New Jersey Columbus: Merrill an Imprint of Prentice Hall, 1995), 156-157.

lebih mengedepankan situasi hubungan antara murid dengan guru yang bersifat independen¹³.

Kelima, kurikulum eksperensial yaitu makna dari pengalaman belajar yang terhayati oleh peserta didik, sementara mereka terlibat dalam berbagai kegiatan dan peristiwa pembelajaran yang dikelola oleh guru ataupun sekolah. Caswell dan Campbell mendefinisikan kurikulum sebagai susunan dari keseluruhan pengalaman anak di bawah bimbingan guru¹⁴.

Bila di lihat dampak kurikulum terhadap tingkah laku peserta didik, maka pada dasarnya yang eksis hanyalah kurikulum lokal¹⁵ yang berupa pengalaman belajar yang digelar oleh guru dari hari ke hari.

Peranan Kurikulum dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat

Sebagaimana dikemukakan oleh Oemar Hamalik dalam Rudi Susilana dkk, bahwa kurikulum dalam pendidikan formal memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Oleh karena itu, terdapat tiga peranan yang dinilai sangat penting, yaitu: (1) Peranan konservatif, (2) Peranan kreatif, dan (3) Peranan kritis/evaluatif¹⁶

1. Peranan Konservatif.

Peranan ini menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini peserta didik. Dengan demikian, peranan konservatif ini pada hakekatnya menempatkan kurikulum, yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakekatnya merupakan proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup dilingkungan masyarakatnya.

2. Peran Kreatif.

Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kurikulum

¹³ Ibid., 179

¹⁴ Ibid., 170-171

¹⁵ Harus di bedakan dari kurikulum muatan lokal yang selama ini banyak dipersepsikan sebagai materi yang seakan-akan ditumpangin saja

¹⁶ Rudi Susilana dkk, *Kurikulum dan Pembelajaran* (Bandung: Jurusan Kutekpen FIP UPI,2006), 10-11

harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap peserta didik mengembangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berfikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya.

3. Peranan Kritis dan Evaluatif.

Peranan ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada peserta didik perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembangan yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena itu, peranan kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan baru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Dalam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam control atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan serta diadakan modifikasi atau penyempurnaan-penyempurnaan.

Dari ketiga peranan kurikulum di atas, tentu saja harus berjalan secara seimbang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum menjadi tidak optimal. Menyelaraskan ketiga peranan kurikulum tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan, di antaranya guru, kepada sekolah, pengawas, orang tua, dan masyarakat. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait tersebut idealnya dapat memahami betul apa yang menjadi tujuan dan isi di kurikulum yang diterapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pendekatan-Pendekatan dalam Pengembangan Kurikulum

Secara garis besar pendekatan dalam pengembangan kurikulum dibagi menjadi tiga antara lain:

1. Pendekatan yang berorientasi pada tujuan, bahwa sebelum membuat suatu kurikulum maka perlu dirumuskan terlebih dahulu suatu tujuan, mulai dari tujuan yang paling tinggi, tujuan nasional sampai pada tujuan yang paling rendah yakni, tujuan intruksional. Dengan adanya tujuan, maka dapat

menetapkan bidang studi yang akan diajarkan, metode yang digunakan, evaluasi dan lainnya. Sehingga tujuan yang akan dicapai menjadi jelas.

Tujuan tersebut memberikan arahan dalam menetapkan materi pelajaran, metode, jenis kegiatan dan alat yang di perlukan dalam mencapai tujuan. Tujuan memberikan arah yang jelas dalam memberikan penilaian terhadap hasil yang dicapai, yang nantinya menjadi GBPP. Oleh karena itu para praktisi pendidikan harus dapat memutuskan tujuan, serta merumuskan tujuan menjadi lebih khusus, jelas, operasional dan dapat diukur.¹⁷ Dalam bidang studi PAI, ada tiga ranah sebagai ntujuan yang dirumuskan, yakni domain kognitif, domain efektif dan domain psikomotorik.¹⁸

edangkan tujuan pendidikan nasional adalah tujuan yang bersifat umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh setiap usaha pendidikan, dengan kata lain bahwa setiap penyelenggara lembaga pendidikan harus berlandasan pada tujuan pendidikan nasional. Sehingga tujuan pendidikan nasional ini sama antara lembaga pendidikan yang satu dengan yang lain.

2. Pendekatan bidang studi, bahwa setelah tujuan dirumuskan, kemudian dilanjutkan dengan meenentukan bidang studi yang akan diajarkan siswa untuk mencuat tujuan tersebut. Bidang studi tersebut disusun secara sistematis sesuai dengan tujuan yang diharapkan, kemudian dipikirkan cara bagaimana penyampaiannya kepada peserta didik atau strateginya. Untuk

¹⁷ Subandjah, *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum...*,56.

¹⁸ Wina Sanjaya, *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum KTSP* (Jakarta: Kencana, 2009), 102-106. Lihat juga Burhan Nuriantoro, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah: Sebuah Pengantar Teoris dan Pelaksanaan* (Yogyakarta: BPEE, 1985), 42-44. Menurut Bloom, dalam bukunya taxonomy of Educational Objectives yang terbit pada tahun 1965, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus di rumuskan dapat digolongkan menjadi tiga klasifikasi atau tiga domain, yaitu domain kognitif, domain efektif dan domainpsikomotorik. Domain koqnitif terdiri dari 6 tingkatan, yakni pengetahuan/knowledge (kemampuan mengingat suatu informasi), pemahaman (kemampuanmenjelaskan dari suatu konsep), penerapan (aplikasi dari suatu teori dalam perilaku), analisis (kemampuan menguraikan atau memecahkan suatu masalah)dan sintesis (kemampuan untuk menghimpun bagian-bagian ke dalam suatu keseluruhan yang bermakna, seperti merumuskan tema, rencana atau melihat hubungan dari suatu yang abstrak), dan evaluasi (kemampuan menilai terhadap sesuatu). Domain afektif, terdiri dari 6 tingkatan yaitu penerimaan (sikap kesadaran/kepekaan terhadap gejala, kondisi, keadaan atau suatu masalah), merespon (kemampuan berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan), menghargaii (kemampuan untuk member penilaian atau kepercayaan terhadap obyek tertentu), mengorganisasi (pengembangan nilai ke dalam oraganisasi tertentu), karakterisasi nilai (mengadakan sintesis dan internalisasi sistem nilai dengan pengkajian secara mendalam). Sedangkan domain psikomotorik ada 6 tingkatan, yakni gerak reflek, ketrampilan dasar, ketrampilan perceptual, keterampilan fisik, gerakan ketrampilan, komunikasi nondiskursif.

mempermudahkannya penyampaian materi kepada peserta didik, maka diperlukan sebuah media, kemudian dibuatkan suatu cara untuk mengukur keberhasilan peserta didik atau dengan kata lain evaluasi.¹⁹

Pendekatan ini menggunakan bidang studi sebagai organisasi kurikulum, contoh misal bidang studi matematika, geografi, pendidikan agama Islam, seperti yang kita lihat pada pendidikan pada zaman sekarang ini. Pendekatan ini dibedakan antara makro-organizer, organizer dan mikro-organizer. Sebagaimana contoh, organizer yakni, fiqh, al-Qur'an-Hadith, Aqidah-Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam. Sedangkan mikro-organizer yakni, Hukum "al" pada al-Qur'an, Sejarah Nabi Muhammad pada periode Makkah dan lain-lain.²⁰

Pengembangan ini dilakukan berawal dari keinginan untuk meningkatkan kualitas belajar pada suatu bidang pengetahuan khusus. Fokus pada peningkatan bagian kurikulum tertentu yang dilakukan atas dasar isi (content) dan tujuan-tujuan yang lebih sempit, dan lebih menekankan pada tahap-tahap persiapan "*field trial*" dan diseminasi kurikulum yang baru. Dengan kata lain lebih menekankan pada pola heuristik²¹ dari pada pola tradisional. Sebagai contoh pembaharuan bidang studi Pendidikan Agama Islam, misalnya tentang tata cara berwudlu yang dimulai dengan praktik, kemudian baru teori tentang wudlu tersebut.

3. Pendekatan berdasarkan kemampuan, dalam penyusunan kurikulum berdasarkan kemampuan tidak jauh berbeda dengan penyusunan kurikulum berdasarkan tujuan. Hal yang membedakan adalah terletak pada tujuan yang penekanannya lebih kepada operasional. Melalui pertanyaan yang sifatnya praktis, setelah lulus dari SMA peserta didik diharapkan akan menempuh pada jenjang perguruan mana? setelah selesai kuliah di perguruan tinggi, mahasiswa

¹⁹ Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan...*, 9.

²⁰ Nasution, *Kurikulum dan Pengajaran* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 44.

²¹ Hendyat Soetopo, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 66. Terdapat dua jenis pengembangan kurikulum, yaitu pola tradisional dan pola heuristik. Pola tradisional adalah tugas-tugas pengembangan dibagi-bagi antara Pemerintah, guru, badan penelitian dan universitas. Badan pengajaran diterbitkan oleh penulis-penulis "*free lance*" dan penerbit-penerbit komersial. Lembaga-lembaga pendidikan guru memberikan pengaruh jangka panjang terhadap sikap-sikap guru. Peranan kunci dalam tipe ini diemban oleh para inspektur, penasehat dan konsultan yang mendorong dan menyebarkan inovasi dan mengambil bagian yang penting dalam "*inservice education*" para guru. Sedangkan pola heuristik adalah pola yang meniru riset dan pengembangan pesawat (mesin) dan industri pertahanan. Penekanannya "*discovery approach*" pada dan "*feld testing*" dan evaluasi. Proses umpan balik tidak lagi berasal dari inspeksi Nasional atau penasehat local seperti pada pola tradisional.

mempunyai kemampuan apa?. Dengan kata lain semua kegiatan proses belajar mengajar menuju kemampuan yang diharapkan oleh lulusannya. Dengan demikian dapat diambil benang merah bahwa kemampuan yang akan dicapai itu merupakan tujuan institusional, sedangkan tujuan kurikulum yakni, berupa berbagai sub kemampuan yang masing-masing berorientasi pada profesi.²²

Tinjauan Historis Kurikulum Pendidikan Nasional

Bila ditinjau secara historis pelaksanaan sistem pendidikan di Indonesia, kurikulum mempunyai konotasi yang negatif. Ungkapan yang sering terdengar adalah kurikulum sering dirubah, namun hasil pendidikan masih diragukan kualitasnya. Padahal pelaksanaan suatu kurikulum dan hasilnya sangat ditentukan oleh berbagai faktor.²³

Penyebab utama rendahnya mutu pendidikan nasional memang cukup kompleks untuk dapat diidentifikasi secara langsung. Beberapa faktor utama kiranya dapat disebut diantaranya:

1. Faktor dana pendidikan yang relatif masih sedikit
2. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai
3. Kurikulum yang kurang menunjang peningkatan mutu
4. Kesemrawutan sistem administrasi dan manajemen pendidikan, termasuk di dalamnya faktor terlalu besarnya campur tangan birokrasi pemerintah.
5. Rendahnya mutu para pendidik/guru.²⁴

Jika kita perhatikan, bahwa arah perkembangan suatu masyarakat pada dasarnya tidak terlepas dari faktor kurikulum.²⁵ Dalam sejarah pendidikan di Jepang misalnya, pada akhir abad ke-19 mempersiapkan diri memasuki masyarakat industri. Kementerian teknik membuka sekolah-sekolah teknik telekomunikasi, produksi besi dari baja, serta pelatihan kerajinan.²⁶

Sementara itu perkembangan kurikulum di Indonesia pada jaman colonial, kurikulum sekolah mengacu pada pola kurikulum di negeri Belanda. Selain sangat efektif dalam penerimaan peserta didik, juga kurikulum diorientasikan pada

²² Dakir, *Perencanaan dan Pengembangan...*, 92.

²³ H.A.R. Tilaar, *Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995* (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1995), 251.

²⁴ J. Sudarminta, *Tantangan dan Permasalahan Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium Ketiga, Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*, A. Admadi dan Y. Setyaningsih (ed.) (Yogyakarta: Kanesus, 2000), 9-10.

²⁵ H.A.R. Tilaar, *Pembangunan Pendidikan...*, 251

²⁶ *Ibid.*, 252.

kebutuhan tenaga untuk pembangunan sarana produksi atau pelayanan pemerintah bagi kepentingan pemerintah Belanda.

Pada masa colonial Jepang, pendidikan berubah menjadi pendidikan untuk semua rakyat. Demi untuk kepentingan kemenangan perang Jepang, pendidikan jasmani dan semangat militer Jepang ditumbuhkan.

Di samping itu, termasuk juga buku-buku pelajaran diterjemahkan dari bahasa asing ke Bahasa Indonesia. Bahasa dan sejarah Jepang mulai di ajarkan sejak kelas 5 Sekolah Rakyat (SR), pendidikan agama mulai diajarkan di Sekolah Negeri.

Pada masa revolusi kemerdekaan, terjadi perubahan di dalam kurikulum. Namun karena revolusi fisik, maka tidak banyak yang terjadi di dalam usaha untuk menyusun kurikulum yang lebih relevan dengan keinginan jaman.²⁷

Pada masa orde lama kebijakan kurikulum lebih diarahkan pada indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang datang dari luar. Dengan sendirinya pendidikan tidak difungsikan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Pendidikan tidak diorientasikan pada kebutuhan pasar, tetapi pada kebutuhan politik. Segala sesuatu diarahkan pada kemauan penguasa, sehingga kebebasan berfikir alternatif, berfikir kritis, semakin lama semakin dikubur.²⁸

Meskipun demikian, mutu pendidikan pada masa tahun 1950-1960 boleh dikata berkualitas tinggi. Pada masa itu hampir tidak ada mahasiswa yang *drop out*, jauh berbeda jika dibandingkan dengan masa sekarang, sudah sekian persen mahasiswa yang *drop out*. Hal ini disebabkan pada waktu itu yang masuk perguruan tinggi hanya yang memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk menempuh studi di perguruan tinggi. Setiap studi perguruan tinggi baik negeri maupun swasta mempersiapkan orang yang pandai dan bermutu tinggi untuk bermacam-macam tugas.²⁹

Pada masa orde baru pendidikan diarahkan pada uniformitas (keseragaman) di dalam berfikir dan bertindak. Pakaian seragam, wadah-wadah tunggal dari organisasi masyarakat, semuanya diarahkan pada terbentuknya masyarakat yang homogen. Stabilitas politik dan keamanan merupakan ajaran utama untuk mencapai perkembangan ekonomi yang tinggi. Akibatnya adalah berkembangnya kelas menengah yang lamban dan lemah, yang tidak kreatif dan

²⁷ Ibid., 251-252.

²⁸ H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 2-3.

²⁹ J.I.G.M. Drost, S.J, *Sekolah: Mengajar atau Mendidik?* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 133.

produktif, dan diarahkan oleh biokrasi yang kaku. Sejalan dengan itu tantangan politik dan sosial yang sangat homogen telah mematikan kehidupan demokrasi.³⁰

Cara-cara berfikir yang lama itu hendaknya diubah dengan cara berfikir baru yang penuh dengan terobosan-terobosan, sehingga dapat mengatasi permasalahan pendidikan pada saat ini dan di masa mendatang. Reformasi pendidikan adalah proses yang kompleks, berwajah majmuk dan memiliki jalinan tali temali yang amat interaktif, sehingga reformasi pendidikan memerlukan pengerahan segenap potensi yang ada dalam tempo yang panjang. Reformasi pendidikan pada dasarnya memiliki tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efisien mencapai tujuan nasional. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi atas berbagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan.

Selama pemerintahan orde baru lembaga pendidikan direkayasa oleh penguasa untuk ikut mendukung rezim Soeharto yang mendewakan stabilitas politik dan keamanan. Salah satunya adalah penyebaran pendapat bahwa mahasiswa dan dosen tidak pantas berpolitik. Demi stabilitas politik itu mahasiswa dipacu untuk giat belajar agar dapat secepat mungkin menyelesaikan studi lalu bekerja mencari nafkah. Dengan sistem SKS dan semester, sisipan tujuan politis itu dapat dicapai dengan cukup mudah.³¹ Padahal mahasiswa tidak hanya dipandang sebagai pencari ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus dilihat sebagai calon cendekiawan dan calon pemimpin masyarakat.

Meskipun demikian, pemerintah orde baru telah berjasa dalam upaya memperluas pendidikan dasar. Pada tahun 1973, hanya 60% anak Indonesia yang masuk sekolah. Pada tahun 1997 hampir semua anak sekolah. Tingkat buta huruf turun dari 43% dari penduduk dewasa pada tahun 1970-an menjadi hanya 15% pada tahun 1997.³² Kemampuan yang dicapai pada masa orde baru tersebut telah menghantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berpendidikan menengah.

Pada kurikulum 1994 yang diberlakukan pada saat itu, jumlah mata pelajaran di SLTA memang dikurangi, tetapi jumlah jam perminggu diperbesar. Sehingga jumlah jam perminggu tetap 40 jam, misalnya matematika dari enam menjadi empat, fisika dari lima menjadi tiga.

³⁰H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru...*, 3.

³¹ Al. Purwa Hadiwardayo, *Menolak Diskriminasi, Mendukung Otonomi, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Sindhumata (ed)* (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 86.

³² *Ibid.*, 126.

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pada pasal 12 ayat 1: bahwa jenjang pendidikan yang termasuk pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.³³

Adanya pemisahan jenjang pendidikan diharapkan mampu membentuk pelajaran yang memiliki kemampuan yang memadai. Namun persoalan utama yang muncul bahwa merosotnya mutu pendidikan di Indonesia sebenarnya bukan karena guru dan dosen, bukan karena fasilitas, bukan karena kurikulum, tetapi peserta didik yang tidak memiliki kemampuan intelektual yang dituntut oleh masyarakat.

Akar permasalahan rendahnya mutu pendidikan terletak pada SMU yang tidak menyiapkan pada peserta didik melanjutkan ke perguruan tinggi dan tidak menyiapkan mereka memasuki lapangan kerja. Satu kesalahan besar dalam penerapan kurikulum 1994 untuk SMU adalah menyusun sebuah kurikulum yang bermutu, tetapi hanya mampu diikuti oleh sekitar 30% dari lulusan SLTP yang dibiarkan masuk ke SMU.³⁴ Oleh karena itu perlu disusun persyaratan masuk SLTA dengan seleksi ketat.

Harus diakui bahwa kurikulum yang diterapkan selama ini masih selalu menekankan pengetahuan (kognitif) semata. Sedangkan penekanan pada penghayatan hidup dan refleksinya dalam kehidupan belum dirumuskan secara jelas.³⁵ Sehingga tujuan membantu menjadikan manusia utuh seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 1989 belum tercapai.

Maka dari itu, tugas pendidikan harus membuka kemampuan yang dimiliki individu seoptimal mungkin melalui sharing of information untuk menjadi manusia yang bukan saja pintar, tetapi juga kreatif, kritis, dan tahan banting (adversity) yang ditandai oleh adversity quotient (AQ) yang tinggi.³⁶

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, yakni: Pengembangan sumber daya manusia (natur), Pengembangan kemampuan manusia (nurture)³⁷

³³ Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 7.

³⁴ J.I.G.M. Drost, S.J, *Sekolah: Mengajar...*, 113.

³⁵ Paul Suparno, *Kurikulum SMU yang Menuju Pendidikan Demokrasi, Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita*, Sindhunata (ed) (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 68.

³⁶ Conny Semiawan, *Relevansi Pendidikan Masa Depan, Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita*, Sindhunata (ed) (Yogyakarta: Kanisius, 2000), 26.

³⁷ *Ibid.*, 26-27.

Konsep nature terkait dengan bakat dan potensi yang dibawa sejak lahir, yang setelah menikmati pengaruh lingkungan berupa pembelajaran, terus menerus berada pada fase perkembangan. Penekanan kurikulum ini tidak terlalu pada kuantitas materi, melainkan pada upaya agar peserta didik menggunakan mentalnya (otaknya) secara efektif dan efisien, sehingga tidak ditandai oleh segi kognitif semata, melainkan pada keterlibatan emosional dan kreatif.

Sedangkan nurture merujuk pada lingkungan yang berada di luar diri individu kurikulum yang relevan untuk masa depan harus memperhatikan berbagai pengaruh lingkungan yang berdampak pada tumbuh kembangnya manusia itu.

Akhirnya untuk menyusun kurikulum yang ditentukan oleh sistem nilai tertentu, seperti agama, moral, etika, sejarah, sains, teknologi, dan lain-lain mustahil untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan sifat keuniversalan kurikulum itu sendiri yang tidak mengenal batas. Dalam hal ini peranan keluarga menjadi faktor fundamental dalam sistem pendidikan nasional.

Analisa Pembahasan Kurikulum Pendidikan

Berbicara pendidikan tentu tidak bisa lepas dengan kurikulum, dan ketika kita berbicara tentang kurikulum, maka pandangan kita akan tertuju pada materi yang tertuang dalam dokumen resmi kurikulum (kurikulum resmi). Kondisi seperti ini sangatlah tidak menguntungkan bagi perkembangan pendidikan itu sendiri, karena pendidikan hanya dipandang untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat seperti masalah tawuran pelajar, pelecehan seksual, pencegahan infeksi aids, dan pemberantasan narkoba, dengan berimplikasi pada penambahan materi kurikulum dan jam pelajaran.

Padahal sebenarnya kurikulum formal hanyalah langkah awal dalam mengemban misi pendidikan yang sangat memungkinkan terjadinya penyelewengan sebelum tercapainya tujuan. Secara sadar atau tidak bahwa kita sering terperangkap dalam pesan pendidikan yang diidentikkan dengan kandungan materi yang terdapat dalam kurikulum formal. Jarang yang menyadari bahwa *hidden curriculum*³⁸ lebih menonjol dan *intended curriculum*, sehingga bermuara pada

³⁸ Hidden curriculum bukanlah kurikulum yang relatif baru. Kurikulum ini telah dimunculkan mulai abad ke-19. Pada awal kemunculannya, kurikulum ini sebenarnya diperuntukkan bagi anak sebelum memulai sekolah. Lihat John Eggleston, *The Sociology of the School, Curriculum* (London et. Al: Roulledge & Kagen Paul, 1980), 113. Bandingkan dengan Danniell Tanner dan Laurel Tanner, *Curriculum Development and Practive*, 183-186.

terlaksananya pesan yang sama sekali berbeda dari yang dikehendaki semula. Dalam pengertian, ketersampaian pesan pendidikan sangat tergantung pada cara penyampaiannya, bukan pada materi pesan yang ingin disampaikan.

Di samping itu, dampak dari proses penyampaian pesan itulah yang seharusnya dikedepankan guna mewujudkan sisi-sisi pesan pendidikan lain yang juga penting dalam kerangka pikir. Tujuan utuh pendidikan yang justru tidak tepat adalah apabila disampaikan hanya dalam kerangka piker *content transmission* model. Sebaliknya sasaran-sasaran pembentukan seperti kebiasaan bekerja secara sistematis, kepekaan sosial, tanggung jawab, kepemimpinan dan sejenisnya itu harus diwujudkan sebagai dampak pengiring dari keterlibatan peserta didik dalam berbagai kegiatan dan peristiwa pembelajaran yang dialami peserta didik.

Daftar Pustaka

- Anam, Choirul. *Pengembangan Kurikulum Agama Islam*. Sidoarjo: Qisthos Digital Press, 2009.
- Dakir. *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Eggleston, John. *The Sociology of the School, Curriculum*. London et. Al: Roulledge & Kagen Paul, 1980.
- Ellis, Artur K., Cogan, J. John, Howey, Kenneth R, *Intraduction To The Foundations of Education*. New Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1986.
- Hadiwardayo, Al. Purwa. *Menolak Diskriminasi, Mendukung Otonomi, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan, Sindhunata (ed)*. Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Hamalik, Oemar. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Idi, Abdullah. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Nuriantoro, Burhan. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah: Sebuah Pengantar Teoris dan Pelaksanaan*. Yogyakarta: BPPE, 1985.
- Nasution, S. *Asas-Asas Kurikulum*. Bandung: Bumi Aksara, 2006.
-, *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
-, *Kurikulum dan Pengajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Sanjaya, Wina. *Kurikulum dan Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum KTSP*. Jakarta: Kencana, 2009.

Imam Syafi'i

- Semiawan, Conny. *Relevansi Pendidikan Masa Depan, Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita*, Sindhunata (ed). Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- S.J, G.M. Drost. *Sekolah: Mengajar atau Mendidik*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Subandiyah. *Pengembangan dan Inovasi Kurikulum*. Jakarta: Grafindo Persada, 1993.
- Sudarminta, J. *Tantangan dan Permasalahan Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium Ketiga, Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga, A. Admadi dan Y. Setyaningsih (ed.)* (Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Suparno, Paul. *Kurikulum SMU yang Menuju Pendidikan Demokrasi, Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita*, Sindhunata (ed). Yogyakarta: Kanisius, 2000.
- Susilana dkk, Rudi. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bandung: Jurusan Kutekpen FIP UPI, 2006.
- Soetopo, Hendyat. *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.
- Tanner, Daniel dan Laurel Tanner. *Curriculum Development Theory into Practice Debra A. Stollenwerk (ed)*. Englewood Cliffs, New Jersey Columbus: Merrill an Imprint of Prentice Hall, 1995.
- Tilaar, H.A.R. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
-, *Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1995.
- Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika, 1999.